

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2026

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase agenda program komunikasi tematik dan prioritas daerah yang dipublikasikan	Persen	19.44%	19.44%	19.44%	19.44%	Meningkatnya informasi program tematik dan prioritas daerah yang dipublikasikan	Persentase Informasi tematik dan prioritas daerah yang dikelola sesuai Rencana Komunikasi Publik	%	25%	25%	25%	25%	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Program Komunikasi Publik Prioritas yang Dipublikasikan berdasarkan Strategi Komunikasi yang Disusun	Program	40	40	40	41	Terlaksananya Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	media	2 Media	2 Media	2 Media	2 Media
																							laporan	1 laporan	-	-	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV							
																				dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika						
																				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
																				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah	Komun	2	3	3	3	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
																					anyakemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	itas	Komunitas	Komunitas	Komunitas	Komunitas
																					Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	424 Konten	417 Konten	417 Konten	417 Konten
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai				89.67		Persentase Pemenuhan Pelayanan dan Informasi Publik sesuai Ketentuan	%				97.2		PresentasePID Pelaksana yang Difasilitasi Pemenuhan Informasi Publik	Prese ntase	20.8325	20.8325	20.8325	20.8325	Tersedian ya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		-	1 Permohonan	-	-
	Persentase Pengaduan Masyarakat	%	97.1	97.1	97.1	97.1		Persentase Pengaduan Masyarakat yang	%	97.1	97.1	97.1	97.1		Persentase Pengaduan dan Aspirasi Publik	Prese ntase	97.10%	97.10%	97.10%	97.10%	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap	Rekomendasi				3 rekomendasi

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
	yang Diselesaikan							Memperoleh Tindak Lanjut							yang Dikelola sesuai Mekanisme Pengelolaan Pengaduan						n, Opini, dan Aspirasi Publik	isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah					
Meningkatnya kualitas tata kelola dan penyelenggaraan Pemerintah Digital	Persentase layanan digital pemerintah yang terpadu	Persen	0	0	0	100	Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan layanan digital	Persentase Komponen Pendukung Keterpaduan layanan digital pada layanan digital yang ditetapkan sebagai objek keterpaduan di tahun yang	%	0	0	0	100	Meningkatnya Dukungan terhadap Penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah	Jumlah layanan digital yang Difasilitasi Pengembangannya sesuai dengan Pedoman	Aplikasi	0	2	4	10	Meningkatnya keterpaduan aplikasi, data/informasi, dan layanan digital Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal	layanan	-	12 layanan	18 layanan	24 layanan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
								berjalan														Data Nasional					
																					Meningkatnya kualitas pelayanan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan	dokumen	-	-	-	1 Dokumen
																					Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan	aplikasi		1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
																				daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	pengembangan aplikasi SPBE						
	Persentase Layanan Digital Pemerintah yang Terkelola	%	0	0	0	50		Persentase Komponen Tata Kelola dan Manajemen Layanan Digital yang Telah Diterapkan	%	0	0	35	57.1		Jumlah Layanan Digital yang Difasilitasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital	Layanan	0	0	2	2	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	dokumen				3 dokumen
																				Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan	dokumen	2 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
	Andal																			Pemerintah Daerah	Data Nasional						
																				Meningkatnya keterhubungan perangkat daerah melalui Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	OPD	46 OPD	46 OPD	46 OPD	46 OPD	
																				Meningkatnya ketersediaan akses internet Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	OPD	46 OPD	46 OPD	46 OPD	46 OPD	
																				Terlaksananya Penyelenggaraan	Jumlah Aplikasi SPBE yang	Aplikasi	12 Aplikasi	16 Aplikasi	22 Aplikasi	30 Aplikasi	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
																				ggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah						
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Siap Dimanfaatkan	%				44.99%	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)				2.75		Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan fasilitasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik	%	37.04				Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%				10%
																				Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	laporan				1 laporan	
																				Tersedianya Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral	%				10%	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
																				yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah						
																				Terlaksananya peningkatan kualitas statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	5 orang		32 Orang		
Meningkatnya keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Persentase layanan digital pemerintah yang Laik Keamanan					4/10 (40%)	Meningkatnya Penyelesaian Tindakan Lanjutan Keamanan Layanan Digital	Persentase layanan digital yang Tindakan Lanjutan Keamanannya Selesai				2/17 (11.763%)	5/17 (29.41%)	Meningkatnya Pengujian Keamanan Layanan Digital	Jumlah layanan digital yang Diuji Keamanannya	Layanan	4	4	4	5	Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah	Jumlah Laporan Pengelola Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah	Laporan				1 laporan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
																				ah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	h Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						
																				Meningkatnya pemenuhan sumber daya keamanan informasi dan persandian sesuai kebutuhan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	OPD				1 OPD	
																				Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dokumen				1 Dokumen	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				ah Daerah	yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

SASARAN	INDIKA TOR	SAT UA N	TARGET				SASARAN PROGRA M	INDIKATO R	SAT UA N	TARGET				SASARA N KEGIATA N	INDIKATO R	SATU AN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATA N	INDIKATO R	SATUA N	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				T W I	T W II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
																				Daerah Berbasis Elektroni k dan Non Elektroni k	Pemerinta han Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
.				

1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 8.138.476.154,99	APBD
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 5.960.553.322,00	APBD
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 6.296.636.800,00	APBD
4	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 562.915.000,00	APBD
5	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 69.476.551,78	APBD
	JUMLAH		Rp. 21.028.057.828,77	

Gresik, 14 Agustus 2026
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik,



KIKI NURIYADI, S.P.,M.M
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19730822 199803 1 004